

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah kelompok terorganisasi, yang para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, mereka melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Di negara demokrasi partai politik di perankan sebagai pilar utama dari sistem tersebut. Partai politik berfungsi sebagai medaitor yang menyampaikan aspirasi politik masyarakat ke pemerintah, sekaligus mengontrol jalanya pemerintahan agar sejalan dengan keinginan rakyat<sup>1</sup>

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda di bandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern.<sup>2</sup>

Sebagai subjek penelitian ilmiah partai politik tergolong relatif muda. Baru pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimulai. Partai politik pertama-tama lahir di negara – negara eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan setelah diikutsertakan dalam proses politik, maka peran partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muslim Mufti, Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm, 29

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 397

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 398.

Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung (link) antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum, sedangkan pada masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Lagi pula partai sering tidak meiliki disiplin partai yang ketat, dan pemungutan iuran tidak terlalu diperhitungkan.

Pimpinan partai yang biasanya sangat sentralitas menjaga kemurnian doktrin politik yang dainut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggotanya yang menyimpang dari garis partai yang telah ditetapkan. Maka dari itu partai semacam itu sering dinamakan partai kader ,Partai Ideologi, atau Partai Asas (Sosisalisme,Fasisme, komunisme, Sosial Demokrat). Ia mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pemimpin dan pedoman pada disiplin partai yang ketat dan mengikat.<sup>4</sup>

Pendidikan kader sangat diutamakan dalam partai jenis ini. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap seleksi untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi, maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan. Partai kader biasanya lebih kecil dari partai masa. Akan tetapi pembagian tersebut diatas sering dianggap kurang memuaskan karena

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 399.

didalam setiap partai ada unsur lindungan (*patronage*) serta perantara (*brokerage*) disamping pandangan ideologi /asas pandangan hidup, sekalipun dalam takaran yang berbeda

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>5</sup>

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Sigmund Neuman dalam menyebutkan dalam buku karyanya partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Neuman partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi Menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu, menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Dalam prespektif sosiologi politik, partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 404.

pemerintahan atau negara. Adapun dalam ilmu politik, istilah partai politik bisa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>6</sup>

Secara umum, tujuan dibentuknya partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Sementara itu, Miriam Budiarto sendiri membedakan partai politik dengan tiga kelompok, yakni kelompok penekan (*pressure group*), kelompok kepentingan (*interest group*) dan gerakan (*movement*).<sup>7</sup>

Di bagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memajukan kepentingannya dihadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.<sup>8</sup> Fungsi partai politik di negara demokrasi diantaranya sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).<sup>9</sup>

Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Dalam hal membantu tugas dan fungsi

---

<sup>6</sup> A. Sahid Gatara, *Sosiologi Politik*, (Bandung: CV Pustaka Bandung 2011), hlm. 221.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 222

<sup>8</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 405.

<sup>9</sup> A. Sahid Gatara, *Sosiologi Politik*, (Bandung: CV Pustaka Bandung 2011), hlm. 227.

pokok organisasi tersebut, seorang kader dapat berasal dari luar organisasi tersebut dan biasanya merupakan simpatisan yang berasal dan bertujuan sama dengan institusi organisasi yang membinanya. Pada umumnya penggunaan kata 'kader' sangat lekat pada partai politik, namun organisasi kemasyarakatan juga mempunyai kader-kader yang membantu tugas ormas tersebut, misal: kader kesehatan; yang mana mereka bukan pegawai dinas yang melaksanakan fungsi kesehatan. Kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu. Kader diambil dari istilah yang diperkenalkan Lenin pada masa pembentukan Partai Komunis Sovyet.<sup>10</sup>

Partai Persatuan Pembaguna (PPP) lahir dalam suatu masa ketika kebebasan berserikat dalam berkumpul terdistorsi secara sistemik oleh kekuasaan orde baru. Ketika PPP lahir, jangkar otorialisme, dan korporatisme negara begitu kuat mencengkram setiap organisasi politik dan organisasi masa. PPP adalah cermin persatuan melalui penggabungan atau fusi dari empat partai politik Islam peserta Pemilu 1971, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).<sup>11</sup>

Pada saat pengumuman pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan, yaitu partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti, dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa'at Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde

---

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kader> diakses pada Minggu 16 April 2017 pukul 15.22 WIB

<sup>11</sup> Syafruddin Amir, *Transformasi Energi PPP*, ( Bandung: Idea Publishing, 2007), hlm. 14

Baru tahun 1973. Partai Pembangunan Persatuan mendapat 39 kursi (7,00%) di DPR hasil Pemilu Legislatif 2014, setelah mendapat sebanyak 8.157.488 suara (6,53%).<sup>12</sup>

Proses pengkaderan atau kaderisasi yang dilakukan oleh parpol terhadap anggota partai calon kader merupakan kelanjutan dari fungsi parpol, yaitu fungsi edukasi (pendidikan) dan fungsi rekrutmen. Parpol sejatinya dalam menjalankan fungsi pendidikan politik tidak boleh pilih kasih—hanya kepada anggota saja—tetapi juga kepada semua warga negara. Namun demikian fungsi pendidikan politik tetap dijalankan oleh internal parpol sebagai kelanjutan dari fungsi rekrutmen, dimana parpol setelah merekrut individu-individu dari masyarakat menjadi anggota akan memberikan pendidikan politik.

Setiap anggota parpol belum tentu otomatis menjadi kader partai. Bagi anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh parpol dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, calon kader itu akan mendapatkan pendidikan politik kader.<sup>13</sup>

Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih berorientasi kepada pementasan dan pengembangan program partai. Pendidikan ini lebih bersifat memelihara mekanisme demokrasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang yaitu:

1. Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk:
  - a. Pemahaman arti berorganisasi;
  - b. Menanamkan loyalitas terhadap organisasi;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 89.

- c. Memantapkan dedikasi;

Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula.

2. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk:
  - a. Membuka wawasan berpikir yang berdasar ideology partai;
  - b. Menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi;
  - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi

Jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya.

3. Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk:
  - a. Membentuk sumber insasni organisasi yang memiliki kemampuan konseptual;
  - b. Membidik cara berpikir sistematis dan strategi;
  - c. Membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara mengantisipasi;
  - d. Mendidik berpikir futuristic.

Jenjang ini diperuntukkan bagi calon-calon politisi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai di Indonesia yang berasaskan Islam.<sup>14</sup> Di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mekanisme dan prinsip kaderisasi partai harus berjalan karena di masa depan hanya partai-partai kader lebih memiliki daya tahan ketimbang partai massa. Kaderisasi partai juga penting dalam konteks mobilisasi dukungan dari para pemilih pemula dan pemilih muda. Dalam anggaran rumah tangga PPP hasil mukhtamar ke VIII pada bab II pasal 3 bahwa syarat menjadi anggota kader PPP yaitu:

- a. Memenuhi syarat sebagai anggota biasa PPP dan mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang.

---

<sup>14</sup> Ketetapan Mukhtamar Partai Persatuan Pemnbangunan Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.



- b. Mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang.

Tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekertaris Umum DPW PPP Jawa Barat Bapa Pepep Saeful Hidayat, menyatakan bahwa rekrutmen kader yang dilakukan di DPW PPP Jawa Barat tidak semuanya sesuai dengan AD/ART, khususnya dalam pasal 3 ayat (3) huruf b. Hal ini berarti tidak sesuai dengan AD/ART yang telah ada sebagai landasan menjalankan organisasi partai yang tentu akan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas kader.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahsanya secara lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Kader Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta, data yang ada dilapangan yang telah di paparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pola rekrutmen kader partai di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana penerapan kriteria anggota kader dalam proses rekrutmen di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap rekrutmen kader partai di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu :

1. Untuk menjelaskan pola rekrutmen kader partai di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat ;



2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kriteria anggota kader dalam proses rekrutmen di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat;
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap rekrutmen kader partai di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam tatanan hukum tata Negara, khususnya dalam tatanan pola perekrutan kader partai dimasa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang penelitian yang sama.
2. Penelitian ini dapat dijadikan masukan yang baik terhadap Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan perekrutan kader partai yang dilakukan di internal partai.
3. Untuk dijadikan bahan acuan oleh mahasiswa atau masyarakat yang ingin mengetahui secara jelas bagaimana pola rekrutmen kader partai di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan.
4. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh masyarakat dalam pola rekrutmen serta seluruh proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang kader partai khususnya di Partai Persatuan Pembangunan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap Partai politik baik di luar negeri atau pun di Indonesia memiliki kader partai masing masing, kader partai tersebut mempunyai andil besar dalam kesuksesan apakah suatu

partai politik tersebut bisa berjalan dengan baik atau partai tersebut mengalami kemunduran karena kurangnya kader. Dalam penalaran yang wajar, kader partai adalah anggota yang menjadi tulang punggung organisasi (partai) politik. Tulang punggung organisasi secara produk perkaderan dan pengabdian yang berjalan secara terus menerus dan sistematis. Hingga seseorang anggota mampu mengemban kerja-kerja organisasi dan menjalankan aktivitas keorganisasian.<sup>15</sup>

Setiap kader partai politik pastinya tidak asal masuk partai begitu saja tetapi melalui tahap rekrutmen kader partai politik masing-masing. Yang dimana rekrutmen berarti penyeleksian dan kader partai berarti anggota partai. Dengan demikian yang dimaksud dengan rekrutmen kader partai politik adalah penyeleksian terhadap masyarakat yang ingin bergabung dalam partai politik yang diminatinya.

Kader partai politik mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing yaitu menjaga stabilitas keutuhan partai dan meningkatkan eksistensi dalam setiap diadakannya baik pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan lain-lain. Kader menjadi tulang punggung partai tanpa kader, partai tidak bisa jalan dan tidak akan ada eksistensi dan pastinya akan mengalami kekalahan dalam setiap pemilihan umum, ataupun pemilihan kepala daerah dan sebagainya.

Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik, adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Seperti dijelaskan pada bab keempat dalam masyarakat terdapat stratifikasi dari segi kekuasaan yang dimiliki yang memiliki kekuasaan elite (pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan dan karena itu mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa rakyat. Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh

---

<sup>15</sup>(<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/11/01/ofybg211-hak-kader-partai>), diakses pada

dengan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif.<sup>16</sup>

Ibnu Rabi menyebutkan tentang siapa yang berhak menjadi raja, Ibnu Rabi mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi raja:

1. Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan-hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya
2. Aspirasi yang luhur
3. Pandangan yang mantap dan kokoh
4. Ketahanan dalam menghadapi kesukaran/tantangan
5. Kekayaan yang besar.
6. Pembantu-pembantu yang setia. (Islam dan tata Negara hal 54)

Sesuai dengan teorinya bahwa penghuni Negara itu terbagi dalam banyak kelas, Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga Negara mampu dan dapat menjadi kepala Negara.<sup>17</sup> Yang dapat dan boleh menjadi kepala negara utama hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna, tentunya dari kelas yang tertinggi, dibantu oleh orang-orang pilihan juga dari kelas yang sama.

Menurut Farabi, adapun duabelas kualitas luhur menjadi seorang pemimpin diantaranya:

1. Lengkap anggota bandanya
2. Baik daya pemahamannya
3. Tinggi intelektualiasnya
4. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya
5. Pencintapendidikan dan gemar mengajar

---

<sup>16</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 171.

<sup>17</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 55.

6. Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman, wanita
7. Pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan
8. Berjiwa besar dan berbudi luhur
9. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain
10. Pecinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim
11. Tanggapan dan tidak sukar diajak menegakan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor
12. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan berjiwa lemah atau kerdil.

Menurut Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi diperlukan dua hal. Pertama, Ahl al-ikhtiar atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga syarat: (1) Memiliki sikap adil; (2) memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (3) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.

Kedua, Ahl al-Imamah, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat: (1) Sikap adil dengan segala persyaratan; (2) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk Ijtihad; (3) Sehat pendengaran, penglihatan dan lisanya; (4) Utuh anggota-anggota tubuhnya; (5) Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum; (6) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menenyahkan musuh; dan (7) Keturunan Quraisy.<sup>18</sup>

## **F. Langkah – Langkah Penelitian**

---

<sup>18</sup> Abdullah AD-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta: Umul Qura, 2016), hlm. 38.

## 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses rekrutmen kader partai di DPW PPP Jawa Barat dan perspektif siyasah dusturiyah terhadap mekanisme rekrutmen kader partai di DPW PPP Jawa Barat.

## 2. Teknik Penelusuran Informasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan informasi sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen kader partai yang dilaksanakan oleh DPW PPP Jawa Barat.
- b. Wawancara (*Interview*) yakni percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.
- c. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mencari dan menelaah buku-buku yang memiliki kaitanya dengan rekrutmen kader partai di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

## 3. Sumber Data

---

<sup>19</sup> Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakearya, 2001), hlm. 7.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diteliti, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sumber Primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum tersebut adalah :

1. AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen anggota kader partai di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat.
3. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah yang dibahas.

b. Sumber sekunder, sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, dan buku-buku. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian melangkah. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk ialah yang mempunyai relevansi apa yang hendak diteliti.<sup>20</sup>

#### 4. Analisis

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dan analisis. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang memaparkan keadaan objek yang diteliti dan menganalisis data sejauh mungkin dalam bentuk aslinya,<sup>21</sup> yaitu

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 157

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 6

kondisi di DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat serta penerapan rekrutmen calon anggota kader partai pada saat ini.

Dengan pola pikir yang deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, kemudian disamakan lagi dengan data-data yang bersifat khusus yaitu pada rekrutmen calon anggota kader partai di DPW Partai Persatuan pembangunan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah dusturiyah mengenai mekanisme rekrutmen calon anggota kader partai di DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat.

